

Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21

Sarwiji Suwandi

Universitas Sebelas Maret

Surel: sarwijiswan@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mempersyaratkan tersedianya kurikulum yang baik. Kurikulum yang baik akan mampu mengarahkan dan menjadi acuan pendidik dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara cermat dengan prosedur yang tepat, mendasarkan pada sejumlah landasan, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat pengguna dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sungguhpun disadari bahwa kurikulum memiliki peran strategis, pemahaman pemangku kepentingan pendidikan tentang ihwal kurikulum dan pengembangannya masih sangat beragam, terlebih pengembangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang memang tergolong sebagai kebijakan baru. Bertalian dengan itu, makalah ini akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum, anatomi dan tahap pengembangan kurikulum, kurikulum era industri 4.0 dan *society* 5.0, dan pengembangan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka.

Kata kunci: pengembangan kurikulum, program studi, responsif, kebijakan merdeka belajar, pembelajaran abad ke-21

A. Pendahuluan

Pelaksanaan pendidikan dituntut mampu menyiapkan peserta didik (baca: mahasiswa) menjadi manusia yang memiliki perilaku dan nilai yang berlaku serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang berubah-ubah. Proses pendidikan harus memberi peluang yang besar bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Dengan pendidikan yang makin berkualitas, masa depan Indonesia yang makin gemilang akan dapat kita capai. Perguruan Tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mempersyaratkan tersedianya kurikulum yang baik. Kurikulum—sebagaimana dinyatakan Richard (2001) dan McNeil (2006)—memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan. Sejalan dengan itu, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan.

Pengembangan kurikulum harus dilakukan sebagai respon atas perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal*

needs), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Sungguhpun demikian, suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman dosen dan pemangku kepentingan pendidikan tentang ihwal kurikulum dan pengembangannya masih sangat beragam, dan masih dijumpai adanya miskonsepsi tentang ihwal pengembangan kurikulum, terlebih lagi bertalian dengan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Seturut dengan itu, makalah ini akan menjelaskan beberapa hal pokok yang gayut dengan pengembangan kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia, yaitu landasan pengembangan kurikulum, tahapan dalam pengembangan kurikulum, kurikulum yang bersesuaian dengan tuntutan abad ke-21 atau Era Industri 4.0 dan Society 5.0, dan pengembangan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka.

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh Richard (2001: 2), “curriculum development is more comprehensive than syllabus design. It includes the processes that are used to determine the needs of a group of learners, to develop aim and objectives for a program to address those needs, to determine an appropriate syllabus, course structure, teachings methods, and materials, and to carry out an evaluation of the language program that results from the processes.

Pengembangan kurikulum yang baik didasarkan pada sejumlah landasan, yakni landasan filosofis, sosiologis, psikologis, konseptual-teoretis, historis, dan yuridis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan mutu capaian pembelajaran, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian proses dan hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan, dan mutu lulusan. Landasan filosofis yang dipilih diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia unggul sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Terdapat sejumlah aliran filsafat pendidikan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, yaitu rekonstuksionisme, progresivisme, esensialisme, dan perenilalisme (Oliva, 2009). Filsafat pendidikan rekonstruksionisme merupakan gelombang penolakan atas krisis kemanusiaan di era modern. Filsafat rekonstruksionalisme berusaha membangun peradaban secara dinamis tanpa terhenti oleh kemapanan, di samping mengembalikan arti kebebasan manusia sesuai dengan fitrahnya. Progresivisme menolak

segala bentuk otoritarianisme dan absolutisme pendidikan serta berorientasi ke masa depan (*progress*) sehingga tidak bersifat instan kekinian (*the present*). Esensialisme bercirikan atas pandangan-pandangan humanisme. Esensialisme berbeda orientasi dengan progresivisme. Jika progresivisme berhaluan masa depan; esensialisme lebih berorientasi mempertahankan nilai-nilai. Perennialisme bercirikan atas norma-norma (nilai-nilai) kekekalan (abadi). Sesuai dengan namanya, perennial ('abadi atau kekal'), aliran ini juga merupakan gelombang penolakan atas modernitas di Barat yang cenderung kering dari nuansa religius. Namun kiranya perlu disadari bahwa pada dasarnya tidak ada satu pun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas.

Secara sosiologis, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Sejalan dengan pandangan ini, kurikulum dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Kurikulum hendaknya diyakini sebagai rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa.

Pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan kebutuhan pendidikan yang dapat memberi kesempatan dan pengalaman kepada peserta didik mengembangkan segenap potensi diri yang dimilikinya agar menjadi capaian prestasi yang unggul. Proses pendidikan harus memperhatikan tingkat perkembangan berpikir, minat, motivasi, dan segenap karakteristik yang dimiliki peserta didik. Pendidikan harus mampu memfasilitasi bertumbuhkembangnya kecerdasan spiritual, social, emosional, dan intelektual secara berimbang. Proses pendidikan harus memperhatikan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Dengan demikian, pendidikan diharapkan akan mampu menghasilkan kecemerlangan akademik dan non-akademik peserta didik. Pengembangan kurikulum harus pula memperhatikan kebutuhan pembelajaran Era Industri 4.0 dan *Society 5.0*, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurikulum pendidikan tinggi semestinya juga dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berdasarkan standar (*standard-based education*) atau pendidikan berbasis capaian (*outcome-based education*) dan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*) atau kurikulum berbasis capaian (*outcome-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal yang selanjutnya diderivasi menjadi standar kompetensi lulusan (capaian pembelajaran

lulusan), standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. Kurikulum berbasis capaian dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap (spiritual dan sosial), berpengetahuan, dan berketerampilan.

Landasan historis pengembangan kurikulum mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Pengkajian tentang landasan historis akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan landasan historis tersebut pengembang kurikulum akan dapat menghindari kesalahan yang pernah terjadi pada masa lampau dan dapat memberi pemahaman tentang hal-hal futuristik yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum.

Secara yuridis, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi tentu harus mengacu pada sejumlah regulasi yang ada. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan mengakomodasi antara lain Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan perubahan dari Permenristekdikti No 44 Tahun 2015. Selain itu, Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia juga harus mengacu pada regulasi (misal Peraturan Rektor tentang Pengelollan dan Penyelenggaraan Program Sarjana) dan panduan yang telah ditetapkan PT masing-masing.

Selain itu, pengembangan kurikulum dan capaian pembelajaran yang tertuang dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) hendaknya mengacu pada *benchmark* pada institusi internasional dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu terkini, seperti pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi, SDGs, dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Pengarusutamaan pendidikan karakter dalam semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan merupakan keniscayaan. Hal mendasar dari pendidikan karakter adalah mendidik dan memberdayakan peserta didik agar mereka memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Lickona (1992) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), yaitu pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), *perasaan tentang moral (moral feeling)*, dan perbuatan atau

perilaku moral (*moral action*). Dengan perkataan lain, pendidikan karakter diperlukan agar peserta didik dapat memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai kebajikan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

C. Tahapan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum secara anatomis terdiri atas: (1) Identitas Program Studi, (2) Evaluasi Kurikulum dan Tacer study, (3) Landasan Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (4) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan, (5) Penetapan Bahan Kajian berdasarkan CPL, (6) Pembentukan Mata Kuliah dan penentuan bobot sks, (7) Struktur Mata Kuliah, (8) Rencana Pembelajaran Semester, dan (9) Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan kurikulum

Sejalan dengan anatomi kurikulum tersebut dapat dikemukakan langkah-langkah atau tahapan pengembangan kurikulum. Pengembangan KPT diawali dengan menetapkan profil lulusan yang didasarkan pada kajian perkembangan IPTEK yang sesuai dengan disiplin bidang ilmu program studi (*scientific vision*) dan analisis kebutuhan (*market signal*). Profil lulusan ditetapkan dengan memperhatikan visi-misi institusi dan masukan dari konsorsium bidang keilmuan, asosiasi profesi, *stakeholders* serta hasil pelacakan alumni (*tracer study*). Langkah kedua adalah merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Sesuai amanat Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 3, rumusan CPL wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran pada KKNI. Langkah ketiga adalah menentukan bahan kajian. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dituangkan dalam bentuk bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI. Langkah keempat adalah penetapan mata kuliah berdasar pada evaluasi kurikulum yang sedang berjalan dan/atau berdasarkan kebutuhan CPL. Langkah kelima, pengorganisasian mata kuliah. Organisasi matriks mata kuliah dalam distribusi semester perlu memperhatikan (a) tahapan pembelajaran menjadi bagian usaha memenuhi CPL, (b) ketepatan letak mata kuliah, dan (c) ketepatan bobot SKS. Langkah keenam adalah penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Langkah ketujuh adalah implementasi pembelajaran dengan memperhatikan sejumlah variabel determinan.

D. Kurikulum Era Industri 4.0 dan Society 5.0

Sejalan dengan ketuhanan Era Industri 4.0 dan *Society 5.0*, rancang bangun kurikulum dituntut mampu menjawab tantangan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yaitu: literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasar pemahaman keyakinan agama. UNESCO menetapkan empat pilar pendidikan, yaitu belajar untuk mencari tahu (*learning to know*), belajar untuk mengerjakan (*learning to do*), belajar untuk menjadi pribadi (*learning to be*), dan belajar untuk hidup berdampingan dalam kedamaian (*learning to live together*). Era Industri 4.0 dan *Society 5.0* menuntut kurikulum yang dihasilkan Program Studi—termasuk program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia—dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan abad ke-21 (*21st century skills*). Keterampilan yang dimaksud terdiri atas *learning skills*, *literacy skills*, dan *life skills*.

Learning skills menekankan pada pembentukan proses mental yang diperlukan untuk beradaptasi dalam lingkungan kerja modern. Keterampilan ini lebih dikenal dengan 9C, yaitu: *critical thinking* (berpikir kritis dalam menemukan solusi suatu masalah), *communication* (berinteraksi dengan orang lain), *creative thinking* (berpikir di luar kebiasaan), *collaboration* (berkolaborasi untuk memperoleh hasil yang maksimal), *computational* (penyusunan model dan teknik penyelesaian numerik), *competition logic* (berpikir dan mengasah logika), *cultural understanding* (pemahaman budaya), *cultural appreciation* (apresiasi budaya), *curiosity* (rasa ingin tahu), *care for self, others, and planet* (kepedulian diri sendiri, sesama, dan alam semesta).

Literacy skills mengacu pada keterampilan literasi sering disebut keterampilan IMT yang berkaitan erat dengan pengetahuan digital yang sangat berbeda saat ini. Keterampilan ini terdiri atas: *information literacy* (memahami fakta, angka, statistik, dan data), *media literacy* (memahami metode dan produk informasi), dan *technology literacy* (memahami kerja dalam jaringan/*internet of thing*).

Literasi mencakup upaya mengembangkan potensi kemanusiaan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, bahasa, estetika, dengan daya adaptasi terhadap perkembangan arus teknologi dan informasi (Suwandi, 2018, 2019). Literasi berkaitan dengan upaya pembudayaan yang menjangkau banyak sasaran, termasuk mahasiswa. Literasi juga berkaitan dengan para pihak yang terlibat dengan upaya pembinaan dan pembudayaan, yakni pendidik profesional, pakar, pemerintah, dan pihak lain. Mereka bukan saja dituntut mentransfer pengetahuan, tapi yang lebih utama adalah

membina, memberi dorongan, memberi semangat, memberi contoh praktik berliterasi, dan bahkan mampu menginspirasi.

Life skills mengacu pada keterampilan individu untuk bekerja secara profesional. Keterampilan ini sering disebut FLIPS, yaitu: *flexibility* (melakukan penyesuaian dari rencana sesuai kebutuhan), *leadership* (memotivasi tim dalam mencapai tujuan), *initiative* (memulai proyek, strategi dan rencan sendiri), *productivity* (mempertahankan efisiensi kerja dalam ketidakpastian) dan *Social skills* (membangun jejaring dengan orang lain yang menguntungkan).

Dalam pengembangan kurikulum, keterampilan abad ke-21 harus secara nyata dideskripsikan pada profil lulusan. Pembelajaran selanjutnya dirancang untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) profil lulusan. RPS bauran (*blended learning*) yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan tuntutan era Industri 4.0 dan *Society* 5.0 serta mampu menghasilkan keterampilan 9C, IMT, dan FLIPS, yang kesemuanya sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

E. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MB-KM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program ini relevan dan sejalan dengan laju pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini, yang kita sadari telah membawa dampak dalam berbagai ranah kehidupan. Salah satu dampak perkembangan IPTEK adalah berubahnya banyak jenis pekerjaan; banyak lapangan pekerjaan hilang, tapi sebaliknya berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Fenomena ini menuntut dunia pendidikan tinggi melakukan transformasi dalam praktik pendidikan dan pembelajaran agar dapat menghasilkan lulusan yang dan responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Program MB-KM memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Perguru Tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MB-KM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun

yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MB-KM, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, (8) Proyek/Membangun Desa, dan (9) Pelatihan Bela Negara.

Pengembangan KPT dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bertujuan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di dalam dan/atau di luar program studi. Fasilitasi perguruan tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dilakukan dengan cara: (1) paling sedikit empat semester dan paling lama sebelas semester merupakan pembelajaran di dalam program studi; (2) satu semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan (3) paling lama dua semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil proses pembelajaran diakui melalui mekanisme transfer sks/rekognisi capaian pembelajaran (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 15 Ayat 3). Redistribusi sebaran mata kuliah dalam semester dan pengembangan instrumen rekognisi capaian pembelajaran mahasiswa mutlak dilakukan. Rekonstruksi dengan tujuan membuat fleksibilitas KPT dalam menunjang proses pembelajaran di luar program studi, menjadi syarat wajib implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka.

Rekonstruksi kurikulum dalam menyikapi Era RI 4.0 dan Society 5.0 dilakukan mulai pada tahap 1 pengembangan KPT dengan mengidentifikasi kesesuaian profil lulusan dengan kebutuhan kerja abad ke-21. Tuntutan kemampuan kerja abad ke-21 bisa jadi berupa profil lulusan program studi yang belum ada sebelumnya (baru) atau yang sudah ada sebelumnya tapi ditambahkan kemampuan literasi baru (Revolusi Industri 4.0) dan komunikasi (*Society 5.0*) dalam deskripsi profil lulusan. Program studi dapat membentuk mata kuliah baru untuk mewujudkan profil lulusan sesuai yang diharapkan. Bisa juga dengan cara memberikan pengalaman belajar dalam bentuk metode dan/atau strategi pembelajaran serta metode penugasan dengan interaksi digital memanfaatkan teknologi

informasi komunikasi. Pembelajaran bauran merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kemampuan kerja abad ke-21 ini.

Rekonstruksi kurikulum dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka lebih banyak dilakukan pada tahap 3 pengembangan KPT. Redistribusi mata kuliah harus dapat menjamin hak mahasiswa belajar tiga semester di luar program studi dapat terpenuhi. Sekurang-kurangnya mata kuliah wajib sejumlah 84 sks sedapat mungkin dapat diselesaikan mahasiswa dalam lima semester, selebihnya 60 sks mata kuliah dapat direkognisi sebagai bentuk kegiatan pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada hemat saya dapat lakukan mahasiswa mulai pada semester lima. Untuk memudahkan rekognisi bentuk kegiatan pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program studi perlu memperhatikan beberapa penempatan mata kuliah, yakni mata kuliah wajib umum (MKWU), mata kuliah wajib PT (MKWPT), mata kuliah wajib fakultas/program studi (MKWF/MKWPS), dan mata kuliah pilihan merdeka belajar kampus merdeka (MKP-MBKM). Ilustrasi penempatan mata kuliah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Distribusi Mata kuliah dalam Semester

Semester	Jumlah sks	Jumlah MK	Kelompok Mata Kuliah							
			MKWU	MKWP T	MKW Fak/PS		MKP-MBKM			
							1	2	3	N
VIII										
VII										
VI										
V										
IV										
III										
II										
I										
Jumlah										

Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka hendaknya dapat memenuhi CPL dan memberikan kompetensi tambahan pada mahasiswa. Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka disiapkan untuk memenuhi hak mahasiswa mendapat rekognisi mata kuliah (*Structure Form*) atau CPL (*Free Form*).

Program studi dapat melakukan distribusi mata kuliah dalam matrik seperti ditunjukkan pada Tabel 2 untuk memudahkan rekognisi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Tabel 2. Tabel Rekognisi Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Nama Mata Kuliah	Kegiatan Merdeka Belajar						
	1	2	3	4	5	6	N
MKW PT							
.....							
.....							
.....							
MKW Fak/PS							
.....							
.....							
MK Pilihan MB-KM							
.....							
.....							
.....							
Total SKS Rekognisi							


 Diisi sks mata kuliah yang dapat direkognisi

Rekognisi bisa dilakukan secara tunggal (satu kegiatan) atau kombinasi (dua kegiatan atau lebih). Dalam hal total sks rekognisi tidak memenuhi 20 sks, program studi dapat menyelenggarakan mata kuliah penunjang dalam Semester Antara sesuai ketentuan Permendikbud No. 3 tahun 2020, Pasal 16 ayat 4 dan/atau secara daring sesuai standar penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Permendikbud No. 109 tahun 2013.

F. Penutup

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, yang antara lain dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan. Banyak jenis pekerjaan hilang dengan hadirnya teknologi. Jenis pekerjaan pada masa yang akan datang pun sering tidak mudah diprediksi. Hal demikian menuntut dunia pendidikan tinggi untuk mampu beradaptasi. Perguruan Tinggi—termasuk Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia—dituntut mampu menyusun kurikulum yang inovatif; kurikulum yang mampu menyediakan dan memberikan fasilitasi bagi mahasiswa agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat pengguna, dunia industri, atau makin berkembangannya kompetensi berwirausaha, khususnya wirausaha literasi.

Salah satu tantangan Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia adalah mampu secara tepat menetapkan profil lulusan; merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL); menetapkan bahan kajian yang sesuai dengan CPL; memberikan

pengalaman belajar yang bermakna; memfasilitasi hak-hak merdeka belajar mahasiswa (belajar di luar Program Studi); dan membimbing dan memfasilitasi mahasiswa untuk senantiasa mengembangkan dirinya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk itu, pengembangan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka hendaknya tidak dilakukan sekadar tambal sulam; tapi harus dilakukan secara komprehensif dan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna).

DAFTAR PUSTAKA

- Lickona, T. 2015. *Educating for Character; Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- McNeil, J. D. 2006. *Contemporary Curriculum in Thought and Action, Sixth Edition*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Oliva, P. F. 2009. *Developing the Curriculum*, Seventh Edition. Boston: Pearson Education, Inc.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*
- Richards, Jack C. 2001. *Curriculum Development in Language Teaching*. New York: Cambridge University Press.
- Suwandi, S. 2018. Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Mencerdaskan dan Tanggung Jawab Menghasilkan Generasi Literat. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Berliterasi dengan Bahasa dan Sastra” yang diselenggarakan oleh Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Kuningan, 27 Oktober.
- Suwandi, S. 2019. *Pendidikan Literasi: Membangun Budaya Belajar, Profesionalisme Pendidik, dan Budaya Kewirausahaan untuk Mewujudkan Marwah Bangsa*. Bandung: Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.